

# MAARIF

ARUS PEMIKIRAN ISLAM DAN SOSIAL

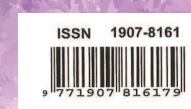
MAARIF Vol. 11  
No. 1 – Juni 2016



Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6, Tebet, Jakarta Selatan 12810  
Telp. 021 8379 4554 | Fax. 021 8379 5758

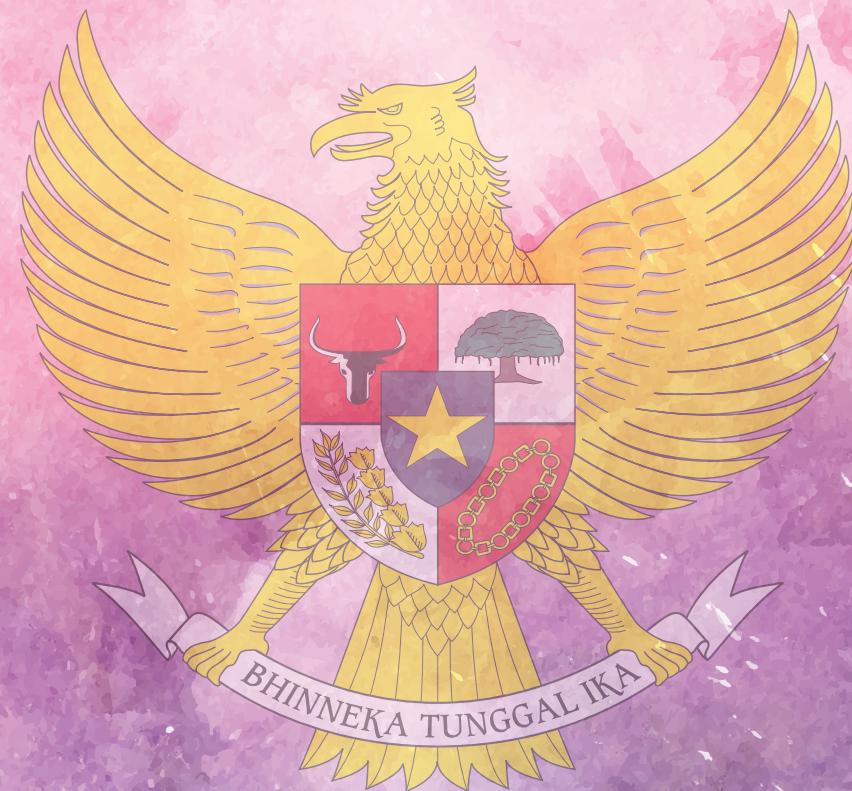
maarif@maarifinstitute.org  
www.maarifinstitute.org

@maarifinstitute MAARIF Institute



MAARIF

TAFSIR KONTEMPORER: NEGARA PANCASILA  
SEBAGAI *DAR AL-'AHDI WA AI-SYAHADAH*



ABDUL HADI W.M. | ANHAR GONGGONG  
HAJRIYANTO Y. THOHARI | HENDAR RIYADI | MUHAMMAD RIDHO BASRI | R. SITI ZUHRO  
SUGENG BAHAGIJO | YUDI LATIF | ZAKIYUDDIN BAIDHAWY

**Penanggung Jawab**

**Pemimpin Umum**

Ahmad Syafii Maarif

**Pemimpin Redaksi**

Jeffrie Geovanie

**Wakil Pemimpin Redaksi**

Rizal Sukma

**Redaktur Tamu**

Fajar Riza Ul Haq

**Dewan Redaksi**

Ahmad Imam Mujadid Rais

Muhd. Abdullah Darraz

Zakiyuddin Baidhawy

Ahmad Najib Burhani

Ahmad-Norma Permata

Clara Juwono

Haedar Nashir

Hilman Latief

Luthfi Assyaukanie

M. Amin Abdullah

M. Supriadi

**Sekretaris Redaksi**

Khelmy K. Pribadi, Ahmad Imam Mujadid Rais

**Redaktur Pelaksana**

Pipit Aidul Fitriyana

**Design Layout**

Deni Murdiani

**Keuangan**

Henny Ridhowati

**Sirkulasi**

Awang Basri, Pripih Utomo

**Alamat Redaksi**

MAARIF Institute for Culture and Humanity

Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6, Jakarta 12810

Telp +62-21 8379 4554 Fax +62-21 8379 5758

website : [www.maarifinstitute.org](http://www.maarifinstitute.org)

email : [maarif@maarifinstitute.org](mailto:maarif@maarifinstitute.org)

[mujadid.rais@gmail.com](mailto:mujadid.rais@gmail.com)

[darrazophy@yahoo.com](mailto:darrazophy@yahoo.com)

**Donasi dapat disalurkan melalui rekening :**

Yayasan A. Syafii Maarif

BNI MH. Thamrin (Wisma Nusantara)

0114179273

**Terbit Perdana Juni 2003**

Redaksi mengundang para cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis untuk mengirimkan tulisan, baik berupa hasil penelitian maupun gagasan, sesuai dengan visi dan misi MAARIF Institute for Culture and Humanity. Tulisan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah dipublikasikan, penulisan mengacu standar ilmiah yang telah ditetapkan oleh redaksi dengan panjang tulisan minimal 4000 kata (10 halaman, 1 spasi, A4) dengan batas makismal 6000 kata (15 halaman). Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit tulisan tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi. Jurnal MAARIF terbit 2 kali setahun (Juni dan Desember).

## Pengantar Redaksi

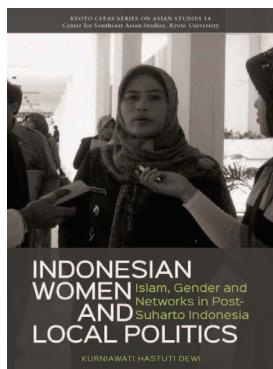
Tafsir Kontemporer: Negara Pancasila sebagai <i>Dar Al'Ahdi Wa Al-Syahadah Suatu Pengantar.....</i>	4
<i>Ahmad Imam Mujadid Rais</i>	

## Artikel Utama

Pancasila sebagai Dasar Negara: Tantangan dan Kesalahan-kesalahan Kita dalam Memahaminya.....	16
<i>Anhar Gonggong</i>	
Pancasila Tauhid Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.....	41
<i>Zakiyuddin Baidhawy</i>	
Pancasila, Etika Politik dan Islam .....	79
<i>Abdul Hadi W. M.</i>	
Ketuhanan sebagai Moralitas Publik .....	98
<i>Yudi Latif</i>	
Otonomi Daerah: Gerbang Menuju Federasi? .....	126
<i>R. Siti Zuhro</i>	
Demosyurakrasi Pancasila: Jembatan Demokrasi dan Permusyawaratan .....	149
<i>Hajriyanto Y. Thohari</i>	
Peranan Negara Memajukan Mobilitas Sosial di Indonesia.....	172
<i>Sugeng Bahagijo</i>	
Keadilan Sosial dalam Bingkai Teologi Al-Maun.....	191
<i>Hendar Riyadi</i>	
Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pandangan Islam .....	207
<i>Muhammad Ridha Basri</i>	

# TIGA WAJAH PEREMPUAN: ISLAM, KESALEHAN, DAN AFILIASI POLITIK LOKAL PASCA REJIM ORDE BARU

Wahyudi Akmaliah



Buku	: Indonesian Woman and Local Politics
Penulis	: Islam, Gender, and Network in Post Suharto Indonesia
Penerbit	: Kurniawati Hastuti Dewi
Tebal	: NUS Press and Kyoto University Press
Tahun	: 272 halaman
	: 2015

## Pengantar

Pasca rejim Orde Baru, studi-studi tentang perempuan bermunculan. Studi tersebut ada yang mengaitkan dengan industri dan buruh, kekerasan rumah tangga, institusi pendidikan, dan poligami. Namun, di antara studi-studi perempuan yang tersebut, baik sebelum dan sesudah rejim Orde Baru, sedikit yang mengangkat bagaimana posisi perempuan dalam dunia politik di Indonesia, khususnya yang mengambil posisi penting sebagai pemimpin di tingkat lokal dengan menautkan analisis Islam dan jender. Buku yang ditulis berdasarkan hasil disertasi S3 ini adalah salah satu yang sedikit tersebut.

Dengan mengambil tiga contoh perempuan di dua wilayah provinsi, yaitu Jawa Tengah (Kebumen dan Pekalongan) dan Jawa Timur (Banyuwangi), buku ini melihat dinamika politik tersebut dengan memfokuskan analisis kepada dukungan organisasi massa Islam (Muhammadiyah dan NU), faktor keluarga sebagai pendukung kuat, afiliasi politik, dan pemosisan Islam sebagai bagian dari identitas kesalehan ataupun strategi untuk mengeruk suara massa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung.

Di sisi lain, kehadiran buku ini juga mengisi kekosongan di tengah studi Islam yang hanya memfokuskan kepada lima hal; dinamika partai politik Islam dalam pemilu pasca reformasi, politik dan pemikiran Islam, Islamisasi sosial, Islam radikal, dan peran perempuan Muslim dalam Indonesia kontemporer (hal. 3-4). Karena itu, dengan melakukan tinjauan terhadap buku karya Kurniawati Hastuti Dewi, tulisan ini membahas ketiga hal yang saling terkait. Pertama, penjelasan mengenai peran perempuan dalam rentang sejarah, dengan memfokuskan kepada era kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kedua, Organisasi Massa, Perempuan, dan Politik Lokal, dengan menjelaskan posisi Muhammadiyah dan NU mengenai perempuan dan kepemimpinan. Ketiga, catatan konstruktif. Ini semacam catatan yang saya jelaskan terkait dengan kemungkinan hal-hal yang luput untuk dibahas oleh penulis.

## Kemunculan Peran Perempuan dalam Rentang Sejarah

Selain menjelaskan posisi perempuan dan politik lokal sebagai latarbelakang pembuka diskusi dalam bab pertama, tawaran konseptual mengenai Islam, jender, ikatan keluarga, dan afiliasi politik yang memainkan peranan penting dalam politik lokal dengan dengan membandingkan situasi Indonesia dan beberapa negara Asia, penulis mengemukakan satu fakta penting terkait perubahan struktur dari dan sebelum rejim Orde Baru mengenai pemilu, yaitu adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1974 menjadi Undang-Undang 22 tahun 1999. Klausul perubahan tersebut berdampak pada struktur pemerintahan Indonesia, dari sentralistik menjadi desentralisasi atau yang dikenal sebagai otonomi daerah. Undang-Undang tersebut kemudian diubah kembali melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, mengkhususkan kepada pemilihan kepala daerah langsung, baik Gubernur, Walikota, ataupun Bupati. Adanya regulasi tersebut bukan hanya menguntungkan orang kuat lokal, baik secara identitas, kapital ekonomi, ataupun massa, melainkan menciptakan struktur kesempatan (*structural opportunity*) yang memungkinkan perempuan memiliki ruang untuk naik

ke panggung politik di aras lokal. Hal ini ditunjukkan oleh penulis dengan menyebutkan data dari tahun 2005-2008, di mana ada 466 pilkada langsung yang terdiri dari 335 di luar jawa dan 111 di pulau jawa. Dari jumlah tersebut, sedikitnya ada satu perempuan yang menjadi kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, di mana porsi mereka jika diprosentasikan menjadi 9.99 persen di pulau jawa dan 4.22 persen di luar pulau jawa.

Kiprah perempuan dalam panggung politik tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Dalam bab dua, *Impact of Islamization and Democractization in Expanding Indonesian Women's Roles in Politic*, penulis melacak peran tersebut dalam empat rejim kepemimpinan, yaitu rejim kolonial pada abad dan akhir 19, pemerintahan Sukarno, pemerintahan Suharto, hingga momentum reformasi. Dengan memunculkan tokoh-tokoh perempuan seperti Kartini, Dewi Sartika, Siti Soendari, dan organisasi/gerakan perempuan seperti Aisyah, Putri Mardika, dan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), penulis menekankan peranan mereka sebagai fondasi utama cikal bakal gerakan perempuan. Hal ini kemudian terlihat dengan berdirinya Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani, sebelumnya Gerwis) pada era transisi pada 4 Juni 1950, yaitu dengan berhentinya penjajahan Jepang (1945-1959) dan kembalinya tentara Belanda untuk menduduki Jepang yang kemudian dimenangkan oleh Indonesia dengan berdirinya negara Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Kehadiran Gerwani, yang memiliki afiliasi di bawah naungan PKI pada tahun 1964, tidak hanya dianggap sebagai gerakan perempuan progresif oleh Sukarno, tetapi kemudian menjadi satu-satunya organisasi yang mendorong demokrasi dalam Undang-Undang Perkawinan dan penentang serius terkait dengan praktik poligami Sukarno yang menikahi Suhartini. Dalam periode tersebut, organisasi-organisasi perempuan yang menjadi sayap partai politik bermunculan, seperti Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar), Wanita Nasional Partai Indonesia Raya, dan Persatuan Wanita Murba (PERWAMU). Namun, gerakan itu (di)hancur(kan) seiring dengan hadirnya rejim Orde Baru melalui Gerakan 30 September 1965 yang diiringi dengan pembantaian massal 1965-1966. Di sini, dua peristiwa yang berbeda dan saling terkait tersebut menjadi penanda hancurnya gerakan dan imajinasi sosial yang dibangun oleh Sukarno dan para pemimpin Indonesia, baik nasional dan daerah.

Kehadiran Suharto melalui rejim Orde Baru tidak hanya menghancurkan gerakan perempuan, melainkan juga partai politik Islam. Meskipun, saat itu, beberapa komunitas Islam memberikan kontribusi penting terhadap pembersihan kepada mereka yang PKI dan di-PKI-kan. Di tengah kekosongan tersebut, wajah gerakan

perempuan dan institusi ikutannya tidak hanya dikontrol Suharto melainkan diubah menjadi semacam, dalam istilah Julia Kusuma, sebagai ibuisme negara. Maksudnya, ideologi jender yang mengarahkan kepada kesetaraan dan adanya proses demokrasi diganti menjadi kesetiaan seorang perempuan dan ibu yang berada di rumah dan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Untuk melakukan upaya pengontrolan tersebut, Suharto kemudian menerapkan ideologi jender dalam skema pembangunan dengan menempatkan perempuan dalam tiga organisasi. Pertama, Dharma Wanita, organisasi yang terdiri dari isteri-isteri para pegawai negeri sipil, khususnya kelas menengah, yang didirikan pada tahun 1974. Kedua, Kongres Wanita Indonesia (Kowani), yang merupakan payung seluruh organisasi perempuan di Indonesia. Ketiga, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), yang didirikan pada tahun 1972, dan bergerak pada masyarakat urban kelas bawah dan pedesaan, dengan lingkup sasaran keluarga. Selain merupakan bentuk pengontrolan aktivitas perempuan dan ibu, melalui tiga organisasi tersebut, di bawah rejim Orde Baru, Suharto membuat program pengurangan jumlah penduduk dengan memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB) sejak tahun 1970 dengan memperkenalkan kontrasepsi pada level terbawah, yaitu desa dan keluarga.

Namun, seiring dengan kebangkitan Islam di Indonesia, kontrol terhadap perempuan, khususnya Muslim, sejak tahun 1990-an terlihat mulai longgar. Selain bebas menggunakan jilbab, mereka juga dapat mengekspresikan keislamannya di ruang publik. Selain itu, ide feminism Islam mulai diterima sejak tahun 1990-an. Hal ini ditandai dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Wardah Hafidz, Siti Musdah Mulia, Zakiyah Munir, Farha Ciciek, Siti Ruhaini Duzhayatin, Lies Marcos Natsir, Nasaruddin Umar, dan K.H. Husein Muhammad. Menguatnya gerakan Islam ini seiring dengan berubahnya posisi politik rejim Suharto yang menempatkan Islam tidak lagi sebagai musuh, melainkan sebagai komponen yang penting untuk mendukung stabilitas rejim tersebut. Dalam konteks ini, feminism Islam mulai berkembang di Jawa, di mana anak-anak muda menjadi agensi yang mempopulerkan ide-ide progresif tersebut. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan peranan politik perempuan pasca rejim Orde Baru, yang ditandai dengan perubahan signifikan terhadap organisasi-organisasi perempuan yang sebelumnya menjadi kontrol utama rejim tersebut. Misalnya, Dharma Wanita mengubah AD/ART 2001, melalui pertemuan tahunan pada 1999, yang awalnya menempatkan perempuan sebagai domestik kemudian menekankan pada semangat menjaga hak-hak asasi manusia; PKK, awalnya berfungsi sekedar alat indoktrinasi rejim Orde Baru

mengenai pengendalian reproduksi perempuan, kini menjadi pendorong untuk kesetaraan jender, advokasi HAM, mengkampanyekan pencegahan penjualan manusia (*human trafficking*) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Munculnya tema jender pada Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Khofifah Indar Parwansa sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan (1999-2001), dan naiknya Megawati menjadi presiden, menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan, juga menjadi penanda perubahan tersebut.

### Organisasi Massa, Perempuan, dan Politik Lokal

Jika pemaparan di atas lebih menekankan kepada latarbelakang kemunculan perempuan Indonesia di ranah publik, bagaimana perspektif Jawa sebagai etnik melihat perempuan? Lebih jauh, bagaimana organisasi massa Islam, seperti Muhammadiyah dan NU yang menjadi representasi ekspresi keagamaan Islam terbesar di Indonesia, dalam merepresentasikan kepemimpinan perempuan? Tiga perspektif itu sangat penting untuk dikemukakan sebagai landasan penulis untuk menjelaskan tiga perempuan di Jawa yang maju dalam pilkada langsung. Dalam bab tiga *The Normative Expectation of Javabese Muslim Women and Islamic Perspective on Female Leadership*, penulis mengemukakan tiga hal tersebut. Alih-alih sebagai teman hidup yang seimbang satu sama lain, dalam budaya Jawa perempuan dianggap sebagai *Konco Wingking* (*teman di belakang*), merujuk sebagai sosok yang hanya berada di dapur untuk memasak. Kondisi ini diperkuat dengan interpretasi ayat-ayat alquran yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pencari nafkah. Hal ini berimbang kepada interpretasi posisi perempuan sebagai sekedar perempuan ibu rumah tangga dan bekerja di ranah domestik. Namun, kondisi tersebut relatif berubah seiring dengan adanya kebijakan rejim Orde Baru mengenai kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, yang secara tidak langsung, memperbaiki kualitas perempuan sejak tahun 1970-an. Meskipun dalam kontrol rejim tersebut menempatkan perempuan ke dalam ranah domestik, perbaikan ke dalam tiga aspek tersebut berlahan-lahan mendorong perempuan untuk terlibat ke dalam ranah publik, seperti bekerja di perusahaan sebagai buruh atau karyawan. Bekerja di publik ini memungkinkan mereka mendapatkan uang dan kemampuan bidang tertentu mereka bertambah. Kondisi ini pun mengubah struktur ekonomi masyarakat, di mana satu keluarga tidak lagi bersandar kepada suami sebagai kepala keluarga, melainkan juga isteri.

Dalam konteks struktur perubahan tersebut, sejak tahun 1930-an, Muhammadiyah dan NU, dengan pijakan pembahasan fatwa agak berbeda,

kedua organisasi tersebut menempatkan perempuan hanya bekerja dan beraktivitas di ranah domestik. Namun, hal itu sedikit demi sedikit berubah sejak tahun 1950-an, di mana kedua organisasi tersebut memberikan ruang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam setiap kedudukan mereka. Meskipun bila dilihat dalam konteks politik, yaitu pemilu tahun 1999, kedua organisasi tersebut memiliki sikap yang berbeda mengenai perempuan menjadi pemimpin. Dengan jelas NU, melalui Bahsul Masa'il, memiliki sikap melalui fatwanya bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin, dalam hal ini adalah presiden. Sementara, Muhammadiyah, walaupun dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin, tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait dengan kemungkinan perempuan menjadi pemimpin dalam pemilu tahun 1999. Dua sikap organisasi besar di Indonesia inilah, menurut penulis, memungkinkan perempuan bisa maju untuk pemimpin dalam proses pemilihan kepala daerah langsung pasca rejim Orde Baru.

Terkait dengan perempuan yang terlibat dalam pilkada langsung, penulis mengambil tiga sosok sebagai studi kasus dengan melihatnya kepada empat faktor utama mengapa mereka bisa terpilih, yaitu latarbelakang keluarga, afiliasi politik, identitas Islam dan kesalehan, serta Jender. Keempat hal tersebut, menurutnya, memainkan peranan penting mengapa tiga perempuan tersebut berhasil untuk menjadi bupati di daerah mereka masing-masing. Pertama, Rustriningsih. Selain memiliki kekuatan kapital sosial sebagai latarbelakang kekuatan politik, di mana Sukamto, ayahnya, aktivis Partai Nasional Indonesia (PNI) dan kemudian pindah menjadi aktivis PDI-P sejak tahun 1987, ia sendiri menjabat sebagai ketua DPC PDI Kebumen dan menjadi ketua Komisi KPU Kebumen pada tahun 1999. Namun, identitas abangan di tengah mayoritas santri masyarakat Kebumen tidak memungkinkan dirinya untuk bertarung melawan kandidat lain. Di sini, kehadiran K.H. Nashiruddin Al-Mansyur yang memiliki pondok pesantren At-Taqwa dan anak penggede NU, Kiai Sururuddin, untuk menjadi calon wakil bupati Kebumen menjadi penguatan agar ia bisa terpilih sebagai orang nomor satu di Kebumen (2005-2010). Sebagai penguatan yang lain, ia juga menggunakan identitas Islam dan kesalehan (piety) dengan ungkapan “reformis dan pemimpin perempuan yang dapat dipercaya” melalui dialog terbuka melalui siaran televisi lokal, RATIH TV. Di sisi lain, selain mendatangi pelbagai Maulidan yang diadakan oleh ibu-ibu pengajian, ia juga membangun kekuatan dengan membangun jaringan komunitas perempuan di ranah lokal, seperti Koalisi Perempuan, Muslimat NU, dan Aisyah. Pelbagai atribut inilah

yang kemudian digunakan kembali saat ia bertarung mencalonkan diri sebagai wakil Gubernur Jawa Tengah bersama Babit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah. Dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini, ia memainkan identitas perempuan sebagai upaya menarik dukungan massa dengan jargon, “wadon milih wadon”.

Berbeda dengan Rustriningsih, dalam studi kasus kedua, penulis menjelaskan sosok perempuan yang tidak memiliki latarbelakang politik, tetapi bisa memenangkan jabatan ketua Bupati di Pekalongan. Sosok perempuan itu adalah Siti Qomariyah. Di sini, ada tiga kapital yang dimainkan, baik sosial maupun kultural yang dimiliki olehnya. Tiga kapital inilah yang memungkinkan PKB memilihnya menjadi kandidat Bupati. Selain ayahnya sebagai pemimpin besar NU di Kebumen, latarbelakang pendidikannya yang lulusan S1 IAIN Wali Songo dan S2 Islamic Studies McGill University, ia seorang petahana, wakil bupati Pekalongan (2001-2006). Ketiga kekuatan itu sebagai modalnya bertarung dalam Pilkada Kebumen 2006 bersama Wahyudi Pontjo Nugroho dari Partai Golkar. Sama seperti Rustriningsih, ia pun memainkan identitas Islam dan Kesalehan serta jender, dalam hal ini identitas dirinya sebagai perempuan, dan membangun jaringan organisasi perempuan (Muslimat dan Fatayat) NU dengan menjadikan pengajian Maulid dipelbagai daerah sebagai kampanye politik, yang menggusus “wadon bae” sebagai tagar politiknya.

Dalam kasus ketiga, penulis mengangkat Ratna Ani Lestari sebagai kandidat terpilih ketua Bupati Banyuwangi dari PDIP. Di sini, meskipun bukan berasal orang politik dan tidak memiliki latarbelakang keagamaan yang kuat seperti Siti Qomariyah, tetapi ia dapat memenangkan pilkada Banyuwangi. Faktor penguatan yang memungkinkan ia bisa bertarung dalam pilkada tersebut adalah karena suami sebagai mantan bupati di Provinsi Bali dan pengurus elit PDIP. Dengan pengalaman di dunia politik, sang suami bisa berhitung mengenai langkah-langkah apa saja yang mesti ditempuh oleh Ratna Ani Lestari. Dalam level akar rumput, mesin politik PDIP di Banyuwangi cukup ampuh untuk memperkuat basis dukungan Siti Qomariyah. Kalkulasi politik ini bisa dilihat dengan kehadirannya yang menggunakan simbol-simbol keislaman yang kuat untuk mendapatkan dukungan moral dan sosial melalui kesalehan jilbab yang dimunculkan dan upayanya mendekatkan diri kepada para Kiai lokal di Banyuwangi. Di samping hal tersebut, dua program yang ditawarkannya kepada masyarakat Banyuwangi juga menjadi faktor penentu lain sehingga banyak suara berpihak kepadanya, yaitu pendidikan dan kesehatan gratis.

Dari analisis yang dikemukakan oleh penulis, ada satu hal temuan yang sangat menarik mengenai tiga perempuan tersebut, meskipun mereka perempuan tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki ikatan dan ataupun membangun hubungan yang kuat dengan organisasi-organisasi perempuan di daerah. Bahkan, mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai isu-isu perempuan. Kalaupun ada, itu pun sekedar dijadikan sebagai agenda dalam program kerja formal, di mana praktek dan realisasinya tidak dilakukan. Ini dilakukan Siti Qomariyah yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Akibatnya, dari ketiga pemimpin perempuan tersebut, tidak ada yang memiliki agenda untuk mengangkat isu-isu perempuan dalam ranah publik. Di tengah situasi tersebut, bagi penulis, keterpilihan perempuan sebagai pemimpin bukan karena ia sebenarnya mewakili suara perempuan. Dengan mengambil konteks perempuan Filipina sebagai pemimpin, penulis ini menunjukkan bahwa perempuan terpilih justru adanya faktor lain yang memungkinkan mereka bisa terpilih. Adanya mesin partai politik yang bekerja, patronase yang dibangun, kekuatan hubungan kekeluargaan ataupun afiliasi politik di antara kekuatan tersebut.

### Catatan Konstruktif

Didukung analisis yang mendalam, data yang berbobot, dan perbandingan studi literatur dengan negara-negara lain, penulis dalam buku ini, tampaknya, sudah mengantisipasi kemungkinan pertanyaan yang muncul ketika orang membacanya. Dengan adanya struktur tulisan yang sistematis didukung tabel dan diagram untuk memudahkan membaca dalam mengklasifikasikan data membuat buku ini tampak tidak ada celah. Karena itu, ketika saya membaca buku ini dua kali untuk mencari kemungkinan celah kosong dan memberikan pandangan pribadi dalam menilai relatif sulit ditemukan. Meskipun demikian, ada beberapa catatan yang bisa saya kemukakan di sini terkait beberapa hal penting. Pertama, tidak adanya pembahasan mengenai platform politik mengenai isu-isu perempuan, khususnya PKB dan PDIP yang menjadi pembahasan dalam studi ini. Dengan adanya pembahasan mengenai platform politik secara mendalam mengenai isu-isu perempuan dalam partai politik akan membantu para pembaca mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya mereka menyikapi persoalan-persoalan perempuan. Lebih jauh, bila platform itu dibahas, pembaca akan disuguhkan bagaimana perempuan dan sekaligus agama sekedar menjadi objek pendulang suara, meskipun perempuanlah yang memiliki suara hampir 50 persen dari keseluruhan suara dalam pemilu di Indonesia dan Islam yang

menjadi penganut sebagian besar politisi tersebut (Afrianti, 2015).

Kedua, pembabakan relasi Islam dan rejim Orde Baru. Di sini penulis hanya membatasi relasi Islam dan rejim Orde Baru kurun waktu tahun 1980 sampai 1990-an. Sementara, relasi Islam dan rejim Orde Baru bisa dibaca dalam tiga hal; 1) menempatkan kelompok Islam sebagai teman yang memberikan kontribusi signifikan naiknya rejim Orde Baru dalam pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1965-1966 (1965-1970-an); 2) meletakkan Islam sebagai ancaman dan musuh (1970-1980-an), di mana hal ini dilakukan rejim Orde Baru setelah mereka melakukan penguatan secara struktur maupun kekuatan mesin politik (peristiwa Tanjung Priok, 1984, dan Talang Sari, 1989, adalah simbol ketertindasan umat Islam di bawah rejim Orde Baru tersebut); 3) pura-pura menjadi rejim Islami (1990-1998), yang ditandai dengan kedekatan Suharto dengan kelompok Islam, berdirinya bank Muamalat, dan ditambahkannya nama dirinya menjadi Muhamad Suharto usai pergi haji ke Mekkah sebagai simbol keislamannya di tengah dukungan sebagian faksi militer yang redup kapadanya (Akmaliah, 2014).

Ketiga, penjelasan mengenai sikap Muhammadiyah mengenai pemimpin perempuan dalam pemilu 1999. Menjelaskan posisi Muhammadiyah terkait boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin ataupun sikap diam Muhammadiyah mengenai kepemimpinan Perempuan pada pemilu 1999 tidak cukup melihat melalui kacamata fatwa Majelis Tarjih. Di sini, penulis perlu melihat dinamika hubungan Muhammadiyah dan negara yang sangat dinamis, yang dipengaruhi pelbagai faktor dan orientasi aktor-aktornya. Sebagaimana dijelaskan oleh Fajar Riza Ulhaq (2014) dengan mengutip Saud el-Hujaj (2003), ada tiga model relasi Muhammadiyah dan Negara sepanjang sejarah perjalanan Muhammadiyah; 1) Muhammadiyah tidak mencapuri urusan politik. Pendekatan ini diterapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di mana Ahmad Dahlan tidak terseret pada pilihan gerakan kooperatif dan nonkooperatif dalam memperjuangkan Indonesia menuju fase kemerdekaan. Model ini bisa disebut juga dengan sikap akomodatif, yang dilakukan Muhammadiyah dalam rejim Orde Baru; 2) Muhammadiyah sebagai subordinasi negara. Ini terlihat pada masa pendudukan Jepang yang militeristik, di mana Muhammadiyah menempatkan aktof negara sebagai institusi pemaksa dengan mendisiplinkan manusia Indonesia dengan cara kekerasan. Model ini berlangsung pada akhir Orde Lama dan awal dekade rejim Orde Baru; 3) Muhammadiyah masuk ranah kenegaraan. Ini terlihat dengan adanya keterlibatan orang-orang Muhammadiyah dalam mendirikan partai politik (Masyumi), membida ni kelahiran partai politik (PAN),

mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB), tergabung dalam Partai Nasdem, melakukan dukungan secara informal kepada Jokowi dan Prabowo dalam pemilihan presiden 2014, terlibat dalam aktivitas non organisasi pemerintah untuk menguatkan arus keislaman dan kebangsaan.

Keempat, mendiskusikan Pancasila sebagai pilar utama kebangsaan. Selain faktor sentimen agama, patronase, mesin politik, dan ekonomi, penulis tidak mengaitkan Pancasila sebagai arus utama yang kerap dibicarakan dan dikampanyekan pasca rejim Orde Baru. Kehadiran Pancasila, tidak hanya mengikis kontruksi dominan patriarki dalam interpretasi nalar Islam yang dilakukan oleh para pemimpin dan partai politik untuk mendapatkan keuntungan, dimensi sekularistik yang dimilikinya memungkinkan perempuan secara sosial dan kultural bisa maju ke ranah publik. Pancasila sebagai fondasi ini juga menjadi jalan penengah di tengah kekuatan, meminjam istilah Jeremi Menchik (2016) sebagai, nasionalisme berketuhanan (*godly nationalism*), yang sudah menyejarah, baik secara sosial, politik, dan kultural di Indonesia. Maksud dari nasionalisme berketuhanan di sini adalah meskipun fondasi berbangsa dan bernegara kita adalah Pancasila, dalam prakteknya faktor agama memiliki peranan yang dominan dalam praktek-praktek sosial, politik, dan budaya. Praktek keagamaan inilah dengan interpretasi Islam inilah yang menjadi wacana dominan dalam ranah publik di Indonesia.

## Penutup

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran perempuan di Indonesia di ranah publik memiliki dinamika pasang-surut seiring dengan bergantinya rejim. Pasca kemerdekaan dan di era rejim Sukarno ini tokoh-tokoh perempuan hadir melalui organisasinya yang dipimpin. Meskipun kehadiran mereka menjadi lebih leluasa di era Sukarno justru melalui merekalah Sukarno mendapatkan kritik keras melalui praktek poligami yang dilakukan dengan menikahi Suhartini. Pada era rejim Suharto, gerakan perempuan tersebut dibonsai ditempatkan menjadi organisasi domestik. Meskipun dipenghujung kejatuhan Suharto tersebut, justru bermunculan tokoh-tokoh perempuan yang memberikan wacana dominan mengenai isu perempuan dan jender bagi anak-anak muda. Pasca rejim Orde Baru, dengan adanya regulasi otonomi daerah dan menguatnya arus Islamisasi di Indonesia, tidak hanya menempat lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi non pemerintah yang menyuarakan kepentingan mereka, banyak dari perempuan kemudian menjadi pemimpin lokal melalui Pilkada di pelbagai daerah di Indonesia. Secara

kalkulatif keterpilihan perempuan jauh lebih baik, meskipun secara program yang membela hak-hak mereka masih jauh dari apa yang diharapkan.

Membaca dinamika tersebut yang ditangkap dengan jeli oleh karya Kurniawati Hastuti Dewi ini, tampaknya, juga sebagai bagian dari advokasi akademis sang penulisnya untuk menyuarakan suara-suara perempuan di tengah rejim patriarki yang mengakar di Indonesia. Advokasi akademis yang dilakukan oleh Kurniawati tidaklah berpihak kepada suara perempuan secara total, melainkan melalui subyek yang kritis, yaitu memberikan kritik kelemahan pada aktivisme perempuan dalam dunia politik dan langkah apa yang mestinya dilakukan. Di sini, Kurniawati tidak hanya menunjukkan dirinya sebagai seorang sarjana perempuan melainkan juga intelektual publik yang memiliki keberpihakan atas apa yang diriset.

Dengan kata lain, melalui buku ini, Kurniawati seakan mengingatkan kepada orang yang bergelut dalam isu, studi, dan kebijakan perempuan bahwa demokrasi memang memungkinkan perempuan bisa naik ke ranah publik dengan menjadi pemimpin lokal. Namun, demokrasi belum mampu memungkinkan perempuan untuk mengartikulasikan gagasannya untuk membela hak-hak mereka. Terpilihnya perempuan menjadi pemimpin lokal di daerah mereka masing-masing sebenarnya bisa menjadi momentum ruang latihan untuk mereka dalam menciptakan otonomi kreatif dalam menguatkan kepada isu-isu akses kesehatan, pendidikan, keluarga, dan pekerjaan yang berbasiskan jender dengan adanya dimensi keadilan sosial yang melingkupi hal tersebut. Jika ini tidak diperhatikan perempuan sekedar menjadi arena pertarungan dalam dominasi laki-laki yang sering kali berpihak kepada kekuasaan politik untuk diri mereka.



Tulisan ini adalah pengembangan dari makalah yang disampaikan dalam bedah buku “Indonesian Woman and Local Politics : Islam, Gender, and Network in Post Suharto Indonesia”, karya Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, yang diadakan oleh Pusat Penelitian Politik, pada Selasa, 19 Januari 2016 Pk.09 , di Ruang rapat lantai XI - Pusat Penelitian Politik, Gedung Wiidya Graha LIPI, Jl. Gatot Subroto No. 10. Jakarta Selatan.

## Daftar Pustaka

- Afryanti, Dina. 2015. "Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia", Book Review, Journal of Southeast Asian Studies, Vol.4, Nomor 3, December, hal.614-617.
- Akmaliah, Wahyudi. 2014. "Indonesian Muslim Killings: Revisiting the Forgotten Talang Sari Tragedy (1989) and its Impact in Post Authoritarian Regime". Makalah tidak diterbitkan sebagai bagian dari proyek riset Asian Public Intellectual (API) Nippon Foundation tentang kolaborasi riset program dalam topik *Hearing the Historical Voices : Oral History of Political Violence in Southeast Asia Region*, 2013-2014.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. 2015. *Indonesian Woman and Local Politics : Islam, Gender, and Network in Post Suharto Indonesia*, Kyoto and Singapore: Kyoto Press and NUS Press.
- Menchik, Jeremmy. 2016. *Islam and Democracy di Indonesia: Tolerance without Liberalism*, New York: Cambridge.
- Ulhaq, Fadjar Riza. 2014. "Muhammadiyah dan Negara", *Kompas*, 22 November.